

MUHAMMADIYAH DALAM PENYEKATAN DEMOKRASI

Oleh: Yudi Latif*

Menjelang Pemilu ketiga pada Orde Reformasi, perkembangan demokrasi Indonesia, yang menurut *text book* bisa dikonsolidasikan dalam dua kali pergantian pemerintahan, masih menyisakan banyak persoalan.

Bukannya tanpa capaian. Kunjungan Hillary Clinton belum lama berselang mengindikasikan adanya pencapaian ini yang bisa diapresiasi dunia luar. Di Asia Tenggara, Indonesia adalah satu-satunya negara dengan perkembangan demokrasi yang positif. Thailand mengalami ketidakpastian. Malaysia terkendala “two-tier democracy”. Filipina bermasalah dalam pranata demokrasi, dengan angka kedua tertinggi di dunia menyangkut pembunuhan jurnalis dengan motif politik. Brunei dianggap “so and so”. Singapura tetap penting dalam perekonomian, tetapi bukanlah model demokrasi. Myanmar adalah problem dunia. Indochina masih ruwet. Tak heran, Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang masuk dalam daftar kunjungan Clinton untuk pertama kali.

Sejauh menyangkut dunia Islam, Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar, dan demokrasi terbesar ketiga, di dunia, dengan watak keterbukaan, moderasi dan toleransi yang menonjol, yang bisa dijadikan acuan baru dalam tata-hubungan berbasis kekuatan cerdas dan kebersamaan nilai kemanusiaan. Citra keterbukaan dan moderasi ini mendapat apresiasi dunia luar seperti diindikasikan oleh kepercayaan untuk menjadi tuan rumah “World Climate Change Summit”, dan “World Islamic Economic Forum, selain juga terbukti oleh kemampuan kita merekonsiliasikan konflik secara damai, seperti penyelesaian krisis di Aceh, Poso, Papua.

Pencapaian

Sejak era Pemerintahan Habibie, perbagai langkah untuk mendemokratisasikan institusi dan prosedur-prosedur politik telah dilakukan dengan sejumlah transformasi yang nyata: pemerintahan terpilih, pemilu yang relatif fair dan berulang, kebebasan berekspresi, keluasaan akses informasi (meski belum ada jaminan perundang-undangan), desentralisasi dan otonomisasi, pemilihan presiden dan pilkada secara langsung dan sebagainya.

Selain itu, terdapat perubahan mendasar berdimensi struktural dan kultural. Yang paling menonjol adalah tercapainya konsensus elit (*elite settlement*) untuk hal-hal fundamental. *Elite settlement* merupakan faktor krusial yang memberi andil besar pada

* Kepala Pusat Studi Islam dan Kenegaraan-Indonesia (PSIK-Indonesia)

kegagalan eksperimen demokrasi Indonesia pada 1950-an. Namun, gelombang demokratisasi pada era reformasi ini menunjukkan perkembangan positif dalam kemauan yang lebih luas di kalangan elit politik untuk mencapai konsensus.¹

Pertama, konsensus untuk melakukan amandemen konstitusi. Elite pada arus utama setuju melakukan perubahan cukup mendasar pada konstitusi melalui amandemen beberapa pasalnya, dengan resistensi yang sangat minimal. Kedua, ada kesepakatan dari para pemegang senjata dengan para elite negeri untuk tidak menghalangi atau membatasi proses demokratisasi. Ini tidak dilakoni dengan merubah tradisi dan budaya militer, tapi melalui penekanan pentingnya konsensus elite ini bagi kemaslahatan bangsa. Walaupun masih memiliki modal politik dan posisi tawar yang tinggi, sebagai salah satu aktor terpenting dalam jagat perpolitikan Indonesia, kerelaannya untuk kembali ke barak, menjadi tentara profesional, tunduk di bawah kekuasaan sipil, dan mengawal demokrasi merupakan kontribusi tak ternilai bagi bangsa.

Ketiga adalah desentralisasi dan distribusi kekuasaan politik sebagai upaya menjaga kesatuan negara. Idealnya, proses ini mengantarkan Indonesia pada partisipasi politik masif dan terbesar dalam sejarah Indonesia maupun dunia. Konsensus oleh bangsa ini mengenai bentuk distribusi kekayaan dan kekuasaan merupakan terobosan demokratisasi melalui pendobran institusi-institusi pra-reformasi. Meskipun harus segera diberi catatan, bahwa kisruh yang terjadi dalam pilkada di beberapa tempat menyiratkan masih lemahnya daya-daya konsensus elit yang antara lain disebabkan oleh masih lemahnya tingkat erudisi dan budaya politik demokratik, selain segi-segi yang menyangkut kelemahan pranata hukum dan kesenjangan sosial.

Keempat, tercapainya kesepakatan diantara para elite individu maupun kolektif untuk loyal pada institusi dan praktik demokrasi. Apapun latar belakang ideologis dan kepentingan mereka, ada semacam kesepakatan bahwa institusi dan praktik demokrasi membantu tercapainya kemaslahatan umum, dan setia pada institusi dan praktik demokrasi ini menjadi kebutuhan dan keniscayaan. Tanpa ada komitmen dan

¹ Proses yang dilalui Indonesia ini mengingatkan pada kasus Spanyol pasca-Franco dalam transisinya menuju demokrasi. Demi menyelamatkan reformasi menuju transisi demokrasi, dan mencegah dead-lock di parlemen karena partisanisme, serta tidak adanya satu partai yang bisa mendominasi, maka elite-elite politik dan partai-partai dari beragam aliran melakukan negosiasi dan kompromi yang mengarah pada moderasi serta kelahiran konsensus. Kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan membantu terciptanya interdependensi dan kerjasama, dari (1) kesepakatan yang disetujui menjelaskan seperangkat aturan, hak warga dan kelompok, dan batas campur tangan pemerintah; (2) partai-partai yang turut dalam perjanjian sepakat posisi mereka lebih baik bila ikut bekerja sama; (3) semua partai setuju mengakomodasi moderasi, resiprositas, dan toleransi; serta (4) semua partai paham, pelanggaran perjanjian bisa merusak tatanan yang ada, jadi semuanya mampu menahan diri.

kepercayaan pada demokrasi dari para elite politik, demokrasi hanya akan tinggal wacana.

Terakhir, dan dihubungkan dengan poin keempat, kesetiaan pada praktik dan institusi demokrasi dengan mengabaikan latar belakang ideologis dan identitas, mengantarkan proses pemoderasian pemikiran dan ideologi yang berada di ujung spektrum berbeda. Elite politik yang berseberangan pun pada akhirnya dipaksa oleh keniscayaan sejarah dan kekuatan demokratis untuk melakukan pendekatan dan relasi yang kemudian memoderasi kestatisan dan kekentalan pemikiran dan ideologi mereka. Indonesia dengan segala keragaman pengelompokan politik mengalami proses moderasi karena tipisnya perbedaan ideologi yang timbul diantara para pemain politik. Konflik politik yang jamak lahir dari pemikiran dan laku politik ekstrim para pemimpinnya, seiring dengan pergeseran menuju moderasi, mendorong kesediaan bernegosiasi dan berkompromi selaras dengan keinginan konstituennya. Moderasi mereduksi potensi konflik kemauan yang lebih luas di kalangan elit politik untuk mencapai konsensus.²

Dengan menunjukkan sisi positif yang dicapai tidaklah perlu membuat kita puas diri. Tengoklah berita utama pelbagai media beberapa pekan terakhir, betapa merisaukan indeks kesengsaraan di negeri ini: anarki di Medan, perbatasan tak terurus, lingkungan tak terurus, Infrastruktur daerah mengkhawatirkan, ekspor terancam, ekonomi Indonesia terus tertekan, pulau terancam, kemiskinan bertambah. Seolah membenarkan gambaran Samuel Beckett, "Air mata dunia masih dalam kuantitas yang konstan."

Persoalan

Dengan kata lain, apa yang telah dicapai hanyalah tahap awal dari proses panjang konsolidasi demokrasi. Tahap konsolidasi menghendaki perhatian pada segi-segi substantif. Karena di benak kebanyakan rakyat yang telah lama mengalami penindasan, ketidakadilan dan kemiskinan, demokrasi melambangkan lebih dari sekadar penghapusan institusi-institusi politik yang represif dan penggantian pemimpin-pemimpin otoriter. Demokrasi merepresentasikan kesempatan dan sumberdaya bagi perbaikan kualitas hidup serta bagi kehidupan sosial yang lebih adil dan manusiawi. Oleh karena itu, konsolidasi demokratisasi harus menjamin terwujudnya esensi demokrasi: pemberdayaan rakyat (*popular empowerment*) dan pertanggungjawaban sistemik (*systemic responsiveness*).

Perhatian pada pencapaian substantif ini perlu diinsyafi ketika kepuasan dan kepercayaan rakyat pada politik di negeri ini terus merosot. Demokrasi yang mestinya mengembangkan partisipasi, kepuasan dan daulat rakyat, justru mengembangkan ketidaksertaan (*disengagement*), kekecewaan dan ketidakberdayaan rakyat.

² Sebagian sebagai imbas *negative good* dari menguatnya pragmatisme sebagai anak kandung dari pembangunanisme Orde Baru; dan sebagian lain karena ekspansi pendidikan dan menguatnya wacana inklusivisme serta mulai robeknya sekat-sekat komunalisme di kota-kota besar sebagai akibat modernisasi, titik-titik *common ground* untuk mencapai konsensus makin lebar.

Masalah utamanya tidaklah pada “sisi-permintaan” (*demand-side*) seperti sering didalihkan para politisi: rendahnya tingkat pendidikan rakyat, pragmatisme pemilih, serta kurangnya kesadaran politik. Sebaliknya terletak pada kelemahan “sisi-penawaran” (*supply-side*), dari ketidakmampuan aktor-aktor politik untuk membangkitkan kepercayaan rakyat.

Seperti menggenapi sindiran David Lloyd George, “Politikus adalah orang yang dengannya kita tak bersetuju. Tatkala kita bersetuju, dia adalah negarawan.” Faktanya, begitu kerap publik berseberangan dengan keputusan politik. Di mata publik hari ini, istilah politik menjadi sinonim dengan ‘korupsi’, ‘asusila’, ‘aji-mumpung’, ‘tipu-muslihat’, ‘eksibisionisme-selebritas’, ‘fasilitas tanpa kerja keras’. Menyebut seseorang punya “motif politik” mengandung konotasi bahwa tindakan orang tersebut tidak dilandasi ketulusan, integritas atau kapasitas untuk menghasilkan sesuatu yang positif kecuali untuk kepentingan pribadi.

Sinisme ini terjadi manakala partai dan para pemimpin politik tak mampu menjawab masalah-masalah kolektif. Masalah-masalah kolektif ini justru timbul ketika institusi-institusi yang semula didesain untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan kolektif terdistorsikan oleh kepentingan memperjuangkan motif-motif perseorangan. Bahkan partai politik yang dasar mengadanya diorientasikan sebagai *interface*, untuk menyatukan aspirasi-aspirasi individual menjadi aspirasi kolektif dalam mempengaruhi kebijakan negara, justru dikuasai oleh orang-per-orang. Akibatnya tidak ada sandaran untuk memperjuangkan kepentingan kolektif.

Perundang-undangan yang mestinya merupakan kontrak sosial dengan warga negara, terdistorsikan oleh kepentingan sempit-sesaat elit politik. Prosedur demokrasi mengalami penjelimeitan dan pemborosan sebagai rintangan masuk bagi para pesaing seraya membuka peluang transaksional yang menguntungkan kepentingan oligarki politik. Dalam logika ini, rekrutmen kepemimpinan lebih menekankan sumberdaya alokatif, ketimbang otoritatif, yang membuat meritokrasi dilumpukan oleh mediokrasi.

Mahalnya biaya kekuasaan memang pantas dirisaukan. Indonesia begitu cepat menandingi fenomena yang sama di Amerika Serikat, dengan GNP yang tak tertandingi negara kita. Indikasinya bisa dilihat dari kenaikan secara eksponensial total belanja iklan politik. Menurut AC. Nielsen, pada 1999, total belanja iklan politik hanya 35 milyar rupiah, meroket tajam menjadi 3 trilyun pada 2004. Menjelang Pemilu 2009, angkanya mencapai 1,327 trilyun pada 2007, menjadi 2,2 trilyun pada 2008, dan dipastikan akan melambung pada tahun pelaksanaan Pemilu ini. Jumlah tersebut akan kian mengerikan jika ditambah pembiayaan pelaksanaan Pemilu dan kekerapan Pilkada, serta pembiayaan kampanye lapangan, mungkin juga *money politics*, dari puluhan partai serta ribuan caleg di daerah pemilihan.

Borosnya pembiayaan politik berbanding terbalik dengan paceklik perekonomian yang menghimpit negeri. Belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi yang lalu, seketika muncul krisis ekonomi global yang membawa luberan krisis baru yang melumpuhkan. Kontradiksi ini harus diwaspadai, karena David Morris Potter pernah berhipotesis, “Demokrasi lebih cocok bagi negara-negara dengan surplus ekonomi, dan kurang cocok bagi negara-negara dengan defisit perekonomian.” Upaya memperjuangkan demokrasi dengan ongkos yang mahal, dalam kondisi paceklik, bisa berujung pada penggalian kuburan bagi demokrasi.

Mewujudkan Negara-Pelayan

Apa yang dilihat dan dirasakan oleh kebanyakan rakyat, demokrasi memang telah membawa perubahan, tetapi belum kunjung membawa kebahagiaan. Padahal, semua modus kekuasaan harus diarahkan untuk mengejar kebahagiaan. Menurut Abu Nasr al-Farabi dalam *Al-Madinah al-Fadhilah*, “Negara yang baik berbuah kebahagiaan.”

Bagi kebanyakan warga, rongrongan utama kebahagiaan ini tidaklah berasal dari persoalan alam dan kualitas perseorangan, melainkan dari kualitas pemerintahan. Bahwa negara merupakan penentu kebahagiaan ditunjukkan oleh survei yang dilakukan di 50 negara seperti dilaporkan oleh Geoff Mulgan (2008). “Pengaruh kualitas pemerintahan terhadap kebahagiaan (kesejahteraan) hidup jauh melampaui efek yang ditimbulkan oleh pendidikan, pendapatan, dan kesehatan, yang kesemuanya itu pun tergantung pada kualitas pemerintahan.”

Usaha demokrasi membawa kebahagiaan menuntut penjelmaan “negara-pelayan” (the servant state). Basis legitimasi negara pelayan ini bersumber pada empat jenis responsibilitas: perlindungan, kesejahteraan, pengetahuan, serta keadilan.

Negara memiliki legitimasi sejauh melindungi warganya dari bahaya, karena ketertiban dan keselamatan sangat esensial bukan saja bagi kehidupan tetapi juga untuk meraih kebahagiaan. Terbukti, negara-negara dengan pencapaian tertinggi dalam indeks kebahagiaan, seperti Norwegia, Swiss dan Denmark, pada umumnya adalah negara-negara demokrasi stabil yang mampu menegakkan hukum, keamanan dan ketertiban.

Legitimasi kedua adalah responsibilitas negara untuk mempromosikan kesejahteraan. Peran pemerintah dalam memfasilitasi kesejahteraan sangat penting. Seperti ditunjukkan Amartya Sen, kelaparan di berbagai negara bukanlah karena kekurangan makanan, melainkan karena rakyat tak memiliki hak milik dan daya beli, sebagai akibat buruknya layanan pemerintahan.

Legitimasi ketiga adalah kemampuan negara mempromosikan pengetahuan dan kebenaran yang sangat vital bagi kelangsungan komunitas bangsa. Tidak ada perbantahan antara rezim demokratis dan non-demokratis atas pentingnya

pengetahuan. Bahkan seorang Mao dalam Revolusi Kebudayaan meyakini, “Sebanyak apa pun mimpi kita, alam akan memberikannya sejauh ada pengetahuan.”

Legitimasi pamungkas adalah kemampuan negara menegakkan keadilan. Menurut Aristoteles, yang membedakan manusia dan binatang adalah kemampuan membedakan yang baik dan buruk, adil dan zalim, yang memperoleh puncak ekspresinya pada negara yang dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan. Keadilan negara ini sangat vital bagi resolusi konflik dalam masyarakat multikultur.

Pemenuhan keempat basis legitimasi negara-pelayan tersebut merupakan pertarungan atas kebahagiaan warga negara. Para pendiri bangsa secara visioner memosisikannya sebagai tujuan negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Memulihkan Trust

Upaya merealisasikan negara-pelayan berpangkal pada upaya untuk memulihkan kepercayaan (*trust*). Perubahan politik harus dimulai dari usaha memulihkan rasa saling percaya dan kepercayaan publik pada politik, bahwa rasionalitas kepentingan individual tak akan dibayar oleh irasionalitas kepentingan kolektif. Kepercayaan bahwa warga negara akan mendapatkan politik sesuai dengan perilakunya harus diubah dengan kepercayaan bahwa politik terpercaya akan mendapatkan partisipasi politik yang sepadan dengannya.

Dalam hal ini, ada baiknya kita menyimak pernyataan Lee Kuan Yew mengenai “trust”, sebagai modal terpenting dalam usahanya mentransformasikan Singapura yang miskin menjadi negara maju. “Modal kami cuma kepercayaan dan keyakinan rakyat, kerja keras, hemat, haus belajar, serta kesadaran bahwa tindakan korup akan menghancurkan segala harapan.” Lantas ia tekankan, “Jangan sia-siakan kepercayaan rakyat. Sebab, modal terbesar untuk perubahan adalah kepercayaan dan keyakinan rakyat. Tugasku adalah untuk memberikan harapan kepada rakyat, bukan untuk membuatnya mengalami demoralisasi.”

Masalah trust ini bukan hanya penting dalam kehidupan politik tetapi juga dalam daya saing perekonomian suatu bangsa. Seperti dinyatakan oleh Francis Fukuyama (1995), “Kemakmuran suatu bangsa, dan juga kemampuannya untuk berkompetisi di pasar global, dikondisikan oleh suatu karakteristik kultural yang bersifat pervasif, yakni tingkat “percaya” (*trust*) yang secara inheren ada dalam masyarakat tersebut.”

Dalam pandangannya, kita tidak dapat memisahkan kehidupan ekonomi dari kehidupan budaya. Dalam suatu era ketika “modal sosial” sama pentingnya dengan “modal fisik”, hanya masyarakat dengan tingkat kepercayaan sosial yang tinggilah yang

akan mampu menciptakan fleksibilitas, organisasi bisnis berskala luas yang diperlukan untuk berkompetisi dalam perekonomian global. Ditambahkan pula bahwa level *trust* yang tinggi bisa mengurangi berbagai ongkos transaksi yang membuat perekonomian berbiaya murah dengan kemampuan membangun jaringan dalam skala luas.

Berdiri di awal milenium baru, menyaksikan arus globalisasi yang kian luas cakupannya, dalam penetrasinya dan instan kecepatannya, mengusik rasa hirau kita akan eksistensi bangsa kita di pentas dunia. Adakah yang bisa banggakan di pentas dunia selain gelar-gelar buruk?

Betapa tidak, tingkat “trust” bangsa ini di mata dunia terus merosot, seperti tercermin dari menguatnya indeks persepsi korupsi, *country risk*, buruknya etika kerja serta sebutan sebagai negara lembek (*soft state*).

Usaha memulihkan trust ini pada gilirannya memerlukan perhatian pada pembangunan katakter bangsa. Betapa perhatian pada segi-segi jasmaniah dan modal teraba (*tangible*) selama ini, telah melalaikan kita pada prasyarat rohaniah kemajuan. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara kecepatan perubahan prosedur dan institusi politik dengan budaya politik. Sehingga yang terjadi, kita memang telah memiliki perangkat keras demokrasi, tetapi perangkat lunak tetap saja tirani.

Jika kita membaca media, perhatikan berita utama di halaman depannya, dan akan segera kita temukan. Cuma ada dua jenis bahasa yang dominan: bahasa politik dan bahasa ekonomi. Kata Rushworth Kidder dari the Institute for Global Ethics, bahasa politik selalu bertanya, ‘siapa yang menang’ (*who’s winning*), sedangkan bahasa ekonomi selalu bertanya, ‘dimana untungnya’ (*where’s the bottom line*).” Jika kita hendak maju secara budaya,” ujarnya, “sepatutnya mesti ada satu bahasa lagi dalam wacana publik, yang mempertanyakan, ‘apa yang benar’ (*what’s right*)?” Menurutinya, bahasa ini merupakan bahasa yang unik yang membuat kita tak terlalu nyaman membincangkannya. Dan untuk membuat kita nyaman berbincang dalam bahasa ini di masa depan, Kidder menekankan perlunya pendidikan karakter.

Yang dimaksud dengan pendidikan karakter di sini adalah suatu payung istilah yang menjelaskan berbagai aspek pengajaran dan pembelajaran bagi perkembangan personal. Beberapa area di bawah payung ini meliputi “penalaran moral/pengembangan kognitif”; “pembelajaran sosial dan emosional”, “pendidikan/kebajikan moral”; “pendidikan keterampilan hidup”, “pendidikan kesehatan”; “pencegahan kekerasan”; “resolusi konflik”, dan “filsafat etik/moral”. Secara singkat, Yang dimaksud dengan pendidikan karakter di sini adalah suatu payung istilah yang menjelaskan berbagai aspek pengajaran dan pembelajaran bagi perkembangan personal. Beberapa area di bawah payung ini meliputi “penalaran moral/pengembangan kognitif”; “pembelajaran sosial dan emosional”, “pendidikan/kebajikan moral”; “pendidikan keterampilan hidup”, “pendidikan kesehatan”; “pencegahan kekerasan”; “resolusi konflik”, dan “filsafat etik/moral”.

Singkat kata, pendidikan karakter menggarap pelbagai aspek dari pendidikan moral, pendidikan kewargaan, dan pengembangan karakter.

Proses pendidikan sejak dini, baik secara formal, non-formal maupun informal, menjadi tumpuan untuk melahirkan manusia baru Indonesia dengan karakter yang kuat. Adapun karakter kuat ini dicirikan oleh kapasitas moral seseorang, seperti keterpercayaan dan kejujuran; kekhasan kualitas seseorang yang membedakan dirinya dari orang lain; serta keuletan dan ketegaran (etos yang positif) untuk menghadapi tantangan.

Peran Muhammadiyah

Karena persoalan karakter ini erat kaitannya dengan situasi rohaniyah, tentu menimbulkan pertanyaan besar, apa yang terjadi dengan modus keagamaan kita. Bagaimana mungkin dalam suatu masyarakat yang dilukiskan bercorak religius, etos dan etika sosialnya lembek dan korupsi merajalela. Tidakkah hal ini berarti bahwa semarak kehidupan keagamaan, seperti tercermin dalam pertumbuhan rumah ibadah dan jemaah haji, hanyalah kesalehan formal yang tidak mengarah pada kebersihan dan kesalehan sosial.

Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tentu tidak berlebihan jika pertanyaan ini pertama-tama ditujukan kepada para pemeluk Islam. Seperti halnya negara-negara Asia Timur sering dilukiskan sebagai *little dragons* (bangsa-bangsa Kong Hucu), kaum Muslim Indonesia dengan ajarannya paling bertanggung jawab untuk melakukan koreksi atas distorsi pemahaman dan praktik keagamaan.

Apakah Islam sejatinya memang tak memiliki etos kerja yang sepadan dengan tantangan modernitas? Tidak seperti salah-sangka Max Weber, yang mengatakan bahwa ajaran Islam yang anti-akal tidak memiliki persyaratan rohaniyah bagi produktivitas dan kemajuan ekonomi, ajaran moral Al-Qur'an memancarkan etos kerja yang positif. Tak kurang dari 50 kali Qur'an memuat kata kerja *aqala*, yang berarti akal-pikiran. Secara tegas pula disebutkan bahwa "tiadalah sesuatu bagi manusia, melainkan sesuai dengan apa yang dikerjakannya" (QS 52: 36-42). "Setiap orang bekerja sesuai dengan bakatnya" (QS 17: 84). "Dan jika engkau berwaktu luang, maka bekerjalah" (QS 94: 7).

Karena perintah Islam untuk aktif bekerja inilah maka Robert Bellah berani mengatakan, bahwa etos yang dominan pada komunitas Islam ideal adalah giat di dunia ini sebagai aktivis yang bersifat sosial dan politik, yang relatif dekat dengan etos yang dominan pada kehidupan modern."

Afinitas antara dorongan rohaniyah keagamaan dengan kegiatan perekonomian juga bisa dilihat jejaknya dalam Islam klasik di Nusantara. Islam masuk ke kepulauan ini melalui

jalur perdagangan; juga terdapat kesesuaian antara kedalaman penghayatan keagamaan dengan kegairahan aktivitas perekonomian seperti dijumpai pada sukubangsa Minangkabau, Banjar dan Aceh; Begitu pun di Jawa, orang-orang kauman yang menumbuhkan industri batik, keretek dan perak, menjalankan kegiatan keagamaan dan perekonomian secara simultan; juga perlu disebutkan bahwa Sarekat Islam sebagai gerakan massa pertama di Indonesia lahir dari rahim saudagar-saudagar Islam (Abdullah, 1986).

Memang benar, lemahnya etos kerja, sebagai cerminan suasana rohaniah keagamaan, tidaklah berdiri sendiri. Ia saling bertautan dengan persoalan dukungan struktural. Clifford Geertz telah lama mengindikasikan, bahwa sekalipun etos "kapitalisme", seperti tercemin dalam sikap tekun, hemat dan berperhitungan, juga dimiliki oleh kaum santri, kekuatan ekonomi santri sulit menjadi besar karena tidak didukung oleh kemampuan organisasi yang baik. Kelemahan organisasi dan ketiadaan apa yang disebut "corporateness", solidaritas kekaryaan, dalam kaum santri secara umum juga dilihat oleh James Siegel di Aceh.

Pada ujungnya, kelemahan-kelemahan ini disebabkan oleh faktor birokrasi pemerintahan yang bersifat eksploitatif, yang melemahkan daya-daya korporasi dalam masyarakat. Wertheim mengatakan bahwa kebijakan pemerintah, bukan saja memberi contoh terhadap kehidupan ekonomi, tetapi juga menentukan tingkat kemajuan ekonomi. Dan kebijakan pemerintah yang buruk, bukan saja menghambat kemajuan, tapi juga melumpuhkan bibit-bibit kewirausahaan dan etos kerja yang telah tumbuh dalam masyarakat.

Jika persoalan organisasi (instutusional) dan birokrasi (struktural) memerlukan waktu yang lama untuk membenahnya secara kolektif, setidaknya kita bisa mulai dari pembenahan pada tingkat personal: memulihkan etos kerja yang positif pada jiwa orang-orang Islam.

Dalam kaitan ini, Muhammadiyah memiliki modal sejarah yang cukup untuk memainkan peran penting dalam usaha pembangunan karakter bangsa. Sejak awal, pertumbuhannya, Muhammadiyah berbasis pada jaringan "kaum dagang mardhika" dengan etos kerja/dagang yang kuat, yang tidak bergantung pada ekonomi kolonial dan ekonomi birokrasi.

Sebagai insitusi keagamaan, Muhammadiyah konsisten dalam jalur kebudayaan, mengimbangi perkembangan politik dengan penumbuhan kapasitas belajar sosial. Integritas moral Muhammadiyah dibuktikan dengan menjaga independensi dalam dunia politik praktis, tidak mengorbankan moral organisasi dengan capaian-capaian politik jangka pendek.

Muhammadiyah juga memiliki ketegaran dalam mengarungi waktu. Konsistensi Muhammadiyah untuk bergerak di jalur sosial-budaya, dekat dengan politik tanpa melekat dengannya, menjadikannya sebagai reservoir moralitas bangsa, dengan tingkat keterpercayaan dan durabilitas yang tinggi. Partai politik boleh jatuh bangun, tapi institusi sosial keagamaan yang lebih berjejak dalam operasi-operasi sosial dan kebudayaan, justru punya stamina yang jauh lebih panjang.

Keterpercayaan dan ketahanan Muhammadiyah bertumpu etos-pelayanan yang bisa menjadi basis kultural bagi penjelmaan negara-pelayan. Muhammadiyah ditilik secara historis merupakan aset dan instrumen penting untuk realisasi dan artikulasi ide-ide pedagogikal, egalitarianisme sosial, dan amal ekumenikal.

Sumber durabilitas Muhammadiyah yang lain adalah kemampuannya melakukan sintesis dan pengambilan jalan tengah. Dilahirkan dari rahim urban, tidak terelakkan bila Muhammadiyah terimbas oleh globalisasi. Bahkan bila mau dirunut, Ahmad Dahlan sendiri adalah produk globalisasi karena proses belajar di Mekah dan pertemuannya dengan Rasyid Ridha maupun terpengaruhinya oleh pemikiran tokoh-tokoh global *pan-Islamisme* masa itu seperti al-Afghani dan Abduh.

Sepulangnya ke tanah air, alih-alih mempromosikan apa yang dia dapatkan di luar, Dachlan berusaha menerjemahkan apa yang ia pahami dari perjalanan belajarnya ke dalam konteks Indonesia. Solusi yang ia tawarkan memiliki kekhasan pengaruh globalisme seperti menerima modernisme, memahami geopolitik internasional melalui kolonialisme, dan melihat umat dari wawasan lebih luas. Namun aplikasinya benar-benar berhubungan dengan kebutuhan dan kepentingan lokal.

Walau globalisasi merupakan bagian integral Muhammadiyah secara historis, tidak lantas berarti ia harus menelannya. Kemampuan kader untuk beranjak dari sekadar mengimpor pemikiran dari luar --*berbentuk pengentalan maupun pencairan Muhammadiyah, baik itu dari Barat maupun dunia Islam*--sesungguhnya menunjukkan kemajuan berijtihad dan kedewasaan epistemik. Melihat permasalahan bangsa secara lebih luas masih merupakan tantangan tersendiri bagi Muhammadiyah.

Muhammadiyah juga *bertahan karena kelenturannya*. Lahir sebagai resistensi terhadap kolonialisme dalam upaya mengintegrasikan kekuatan dan persatuan Islam dengan menggunakan strategi apropriasi. Bentuk perlawanan yang ditawarkan oleh Muhammadiyah bukan berbalik pada nativisme (jangan pakai produk Barat) malah

pada hibriditas (lawan Barat dengan produk Barat). Proses ini bisa terjadi melalui mekanisme khas Muhammadiyah: *tajdid*.

Ahmad Dahlan sendiri adalah produk dari proses ini. Hidup di lingkungan kauman di Yogya, dia membuka diri bagi pengaruh pendidikan Barat, juga belajar huruf latin dan khazanah ilmu modern dari rekan-rekannya di Budi Utomo. Hasilnya, melalui organisasi yang didirikannya, ditelurkan publikasi rutin melalui mesin cetak modern dan didirikan sekolah persilangan antara sekolah model kolonial dan pesantren.

Ia termasuk mereka yang pertama-tama memperkenalkan bangku dan papan tulis (sebuah tanda modernitas seperti komputer sekarang). Komunitas epistemik yang dibentuk melalui pengenalan rasionalisme, kurikulum, dan perangkat modern Barat ini merupakan pembedaan loncatan historis.

Sehingga, walau terlihat sebagai seorang puritan yang menghebohkan Masjid Kesultanan, jauh di dalam diri Dahlan bersemayam kelenturan dan kemoderatan. Jauh dari menolak Barat, juga jauh dari memeluknya; dekat dengan tradisionalisme tapi tidak menjadi tradisionalis. Ahmad Dahlan adalah tokoh muslim *liminal*, seorang yang berdiri di jalan tengah, mengawinkan tradisi dan inovasi. Keseimbangan adalah kunci yang menjaga kelenturan dan kemoderatan Dahlan. Bertajdid menjadi upaya menjaga keseimbangan itu. Tanpa keseimbangan, semua akan runtuh.

Kesemua modal historis Muhammadiyah itu sangat penting sebagai bantalan untuk membangun karakter bangsa dengan daya keterpercayaan, moralitas dan ketegaran dalam konteks masyarakat multikultur yang tengah berjuang mengkonsolidasikan demokrasi dalam arus deras pengaruh globalisasi.

Sehingga yang diperlukan oleh Muhammadiyah bagaimana merevitalisasi modal kultural dan sosialnya, sebagai sumber pengisian bagi pemulihan moralitas dan kepercayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dengan tetap mempertahankan posisinya sebagai kekuatan sosial-budaya yang imparial.